

SEBERAPA PENTING *AUDIT REPORT LAG* DI PEMERINTAH DAERAH PERLU DIUNGKAPKAN?

Khoirul Fuad*, Amalia Septiana Dela Wiradinata
khoirulfuad@unissula.ac.id; amaliaseptianadw@gmail.com
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO. Box 1054/SM Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Kepastian akan laporan keuangan pemerintah daerah disajikan kepada publik secara tepat waktu menjadi salah satu faktor utama dari sebuah kesuksesan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, hal ini dikarenakan laporan keuangan akan dijadikan oleh publik dalam mengevaluasi kapabilitas pengelolaan sumberdaya yang ada telah dilakukan secara efektif dan efisien atau belum? Disamping itu ketepatan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah ini juga dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Penelitian ini akan mengkaji beberapa indikator yang berkaitan dengan lama atau tidaknya penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah selama tahun 2015 – 2017 dengan menggunakan ukuran keefektifan dari internal audit, ukuran pemerintah daerah serta dilihat dari sudut pandang opini audit di masing-masing daerah. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (LHP BPK) dari masing – masing pemerintah daerah serta dari laporan kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LKjIP BPKP) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan alat analisis berupa Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Audit Report Lag*, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Audit Report Lag*, dan Opini Audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

Kata kunci : *Audit Report Lag*, Audit Internal, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit

ABSTRACT

The certainty of disclosing local government financial reports to the public in a timely manner is one of the main factors of a local government's success in financial management. This is because financial reports are used by the public to evaluate the management capabilities of existing resources. The public wants to ensure that these resources are managed effectively and efficiently. Additionally, the accuracy of local government financial reports disclosure is also used as a basis for future decision making. This study will examine several indicators related to the time of local government financial reports disclosure in Central Java during 2015 - 2017. This study used a measure of the effectiveness of internal audit, local government measurement from the perspective of audit opinion in each region. The data in this study were secondary data, namely the audit report of the financial audit agency (LHP BPK) from each local government. Furthermore, it also comprised the performance report of state development audit agency (LKjIP BPKP) in Central Java. The data obtained will be processed using Eviews 9 analysis tool. The results of this study indicate that the Internal Audit has no significant negative effect on the Audit Lag Report, the Size of the Local Government has no significant negative effect on the Audit Report Lag, and the Audit Opinion has no significant negative effect on the Audit Report Lag.

Keywords: *Audit Report Lag, Internal Audit, Local Government Measurement, Audit Opinion.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan pada sektor pemerintah berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial*

position), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selain itu agar relevan, informasi

harus disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*).

Untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan dapat meminimalkan *audit report lag*. *Audit report lag* merujuk pada perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan serta merujuk pada waktu dan akhir tahun fiskal entitas sampai tanggal laporan audit. Pada sektor pemerintah, ketepatan waktu laporan keuangan berperan penting dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik (Mohamad, 2012).

Rachmawati (2008) menjelaskan bahwa auditor internal memiliki tugas dalam entitasnya yaitu memeriksa dan mengevaluasi ketersediaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara periodik. Entitas yang memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik akan dapat mengurangi perosedur audit yang dilakukan oleh auditor eksternal yang nantinya akan mempercepat proses penyelesaian audit. APIP merupakan aparat profesional yang memiliki sertifikat auditor dengan pemahaman mendalam tentang budaya bisnis organisasi, sistem, dan proses audit. Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 16 Tahun 2015 mendefinisikan Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Dalam peraturan kepala BPKP RI Nomor 16 Tahun 2015 ada 5 tingkatan tingkat kapabilitas APIP yaitu level 1 (*initial*), level 2 (*infrastructure*), level 3 (*interated*), level 4 (*managed*) dan level 5

(*optimazing*). Tingkatan tersebut menunjukkan bahwa jika skor tingkat kapabilitas yang dimiliki inspektorat tersebut semakin mendekati 5, maka kapabilitas inspektorat semakin baik. Semakin baik kapabilitas inspektorat maka akan mengurangi *audit report lag* pemerintah daerah.

Salah satu upaya pemerintah dalam menilai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan menilai ukuran pemerintah daerah. Carslaw dan Kaplan (1991) menyebutkan bahwa ukuran pemerintah yang lebih besar cenderung memiliki kontrol internal yang lebih baik dan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Semakin besar ukuran pemerintah daerah diduga akan mempercepat proses audit sehingga mengurangi *audit report lag* karena ukuran pemerintah daerah yang besar memiliki kecenderungan lebih diperhatikan oleh masyarakat untuk menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu.

Kemuadian faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah opini audit. Menurut Stepvanny dan Gatot (2012), opini audit merupakan simpulan dari proses audit yang dilakukan auditor independen atas laporan keuangan suatu instansi mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam semua hal yang material sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini audit terbagi dalam lima (5) jenis menurut Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) yaitu *unqualified opinion*, *unqualified opinion with modified wording*, *qualified opinion*, *adverse opinion*, dan *disclaimer of opinion*. Lina dan Yohanes (2009) mengemukakan bahwa entitas yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) akan cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya dibandingkan entitas yang menerima selain opini wajar tanpa pengecualian dari auditor.

Penelitian Wicaksono dan Sutaryo (2017) terhadap *audit report lag* pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu audit internal dan asistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Siregar (2015) mengungkapkan bahwa *audit report lag* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu ukuran pemerintah daerah dan *leverage*. Ukuran pemerintah daerah yang besar cenderung lebih cepat mengungkapkan laporan keuangannya sehingga dapat mengurangi *audit report lag*. Hardini dan Sukirman (2016) menjelaskan bahwa *audit report lag* pada pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu ukuran daerah dan opini auditor. Opini audit dapat memberikan pengaruh pada *audit report lag* karena semakin baik opini auditor menunjukkan bahwa tidak banyak salah saji materiil yang ditemukan oleh auditor, hal ini dapat menjadi gambaran bahwa sistem penyusunan laporan keuangan pada suatu daerah tersebut telah baik. Hal ini senada dengan penelitian Hapsari, dkk. (2016) yang mengemukakan opini auditor berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*. mengemukakan opini auditor berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*. Berbeda dengan penelitian diatas, Utami (2006), penelitian tersebut mengungkapkan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang penelitian yang telah dilakukan oleh Wicaksono dan Sutaryo (2017). Penelitian tersebut menggunakan Audit Internal (X_1), dan Asistensi BPKP (X_2) sebagai variabel independen serta *Audit Report Lag* (Y) sebagai variabel dependen. Peneliti meneliti kembali penelitian Wicaksono dan Sutaryo (2017) dengan menambah variabel Ukuran Pemerintah Daerah yang mengacu pada penelitian Itsniawan dan Suranta (2015) dan mengganti variabel Asistensi BPKP dengan variabel Opini Audit yang mengacu penelitian Fontanella dan Rossieta (2014).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori keagenan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini dan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Halim dan Abdullah (2006) mengemukakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Audit internal dalam hubungan keagenan berperan sebagai agen dan masyarakat adalah sebagai prinsipal. *Internal auditor* bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan rekomendasi, dan informasi lain kepada pihak prinsipal. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan obyektivitasnya dengan aktivitas yang diauditnya agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik.

Ukuran pemerintah daerah dalam hubungan teori kepatuhan, pemerintah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan amanah rakyat memiliki keharusan untuk melaporkan pertanggungjawabannya atas keuangan dan operasional tersebut selama satu tahun buku. Hal ini berarti pemerintah mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil atau laporan keuangan pada akhir tahun, pendapat ini dapat menjadi sebuah penilaian akan kesuksesan suatu kinerja baik keuangan/non-keuangan pemerintah daerah. Jika sinyal pemerintah daerah mengindikasikan *good news*, maka pemerintah tersebut telah menyelesaikan

tugasnya dengan baik. Publik dapat mengartikan pemerintah daerah yang memiliki *bad news* sehingga tidak mempublikasikan laporan keuangannya mengakibatkan *audit report lag* semakin panjang dan dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Audit Internal terhadap *Audit Report Lag*

Lembaga Auditor Internal (2004) mendefinisikan fungsi audit internal sebagai kegiatan independen yang bertujuan menyediakan jaminan dan konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki nilai tambah untuk operasi organisasi. APIP merupakan aparat profesional yang memiliki sertifikat auditor dengan pemahaman mendalam tentang budaya bisnis organisasi, system, dan proses audit. Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Hussin dan Bamahros (2013) juga berpendapat bahwa meningkatnya audit internal akan mengurangi defisiensi pengendalian, sehingga auditor eksternal akan mengurangi jumlah bukti yang dikumpulkan, sehingga dapat mempercepat proses audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Sutaryo (2017) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Audit Internal berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Report Lag*

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang lebih besar cenderung memungkinkan pemerintah untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah juga terdapat tekanan politis yang dialami oleh birokrasi pemerintah lokal tersebut untuk lebih transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan (Siregar, 2015). Pemerintah yang memiliki asset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki asset lebih kecil, dikarenakan pemerintahan ini memiliki sumber daya atau asset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, dan juga pengawasan yang ketat dari seluruh pihak mengingat ukuran pemerintah yang besar berarti terdapat banyak *stakeholder* didalamnya, Artinya bahwa semakin besar asset pemerintahan maka semakin pendek *audit report lag*.

Penelitian Courtis (1976), Gilling (1977), dan Whittered (1980) dalam Imam (2001) yang menunjukkan bahwa *audit report lag* memiliki hubungan negatif dengan ukuran pemerintahan. Penelitian Aziz, dkk. (2014) menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar akan mendapat tekanan dari publik untuk segera menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*

Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Report Lag*

Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil atau laporan keuangan pada akhir tahun, pendapat ini dapat menjadi sebuah penilaian akan kesuksesan suatu kinerja baik keuangan/non-keuangan pemerintah daerah. Penelitian Payne dan Jensen (2000) yang menyatakan bahwa semakin buruk opini yang didapat maka semakin lama terjadi *audit report lag*. Penelitian Rachmawi (2016) yang menunjukkan bahwa ketika suatu pemerintahan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) maka pemerintahan daerah tersebut akan berusaha untuk mempertahankan kinerjanya. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Opini audit berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi berupa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan total 87 data pengamatan. Sedangkan sampel yang digunakan adalah Laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Seluruh Pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tiga periode berturut-turut yang telah diaudit oleh BPK.
3. Pemerintah daerah yang telah mendapatkan level kapabilitas APIP selama tiga periode berturut-turut dari tahun 2015-2017.

Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Regresi data panel memiliki karakteristik *data cross section*, *time series*, dan data panel. Karakteristik dari *cross section* adalah data yang lebih dari satu individu, sedangkan untuk karakteristik data *time series* adalah setiap individu memiliki lebih dari satu periode pengamatan.

Analisis Regresi Data Panel

Uji regresi data panel digunakan pada data *time series* yaitu dari tahun 2015-2017. Dalam menguji hipotesis ini, terdapat tahap-tahap pengujian. Pertama melakukan estimasi dengan 3 pendekatan model yaitu pendekatan *Common Effect Model*, pendekatan *Fixed Effect Model*, dan pendekatan *Random Effect Model*. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan model yang terbaik antara Uji Chow atau Uji Housman.

Uji Chow

Pengujian ini dilakukan agar terpilih model yang sesuai antara model *Common Effect* atau model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel dengan menggunakan *Redundant Fixed Effect - Likelihood Ratio*.

Uji Housman

Housman test adalah pengujian statistic untuk memilih apakah *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Hasil pemetaan data sampel yang telah terkumpul dalam penelitian ini tersaji dalam tabel berikut dan telah disesuaikan dengan kriteria yang digunakan:

Tabel 1. Distribusi Sampel Penelitian

No	Sampel Penelitian	Total
1	Pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah	35
2	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang tidak diaudit oleh BPK	-
3	Pemerintah daerah yang tidak mendapatkan level kapabilitas APIP	6
	Jumlah pemerintah daerah yang dijadikan sampel	29
	Jumlah data (29 x 3 tahun)	87

Formula yang digunakan dalam pengukuran variabel tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
<i>Audit Report Lag</i>	Tanggal Laporan Auditor-Tanggal Laporan Keuangan
Audit Internal	<i>Internal Audit Capability Model/level</i> kapabilitas APIP
Ukuran Pemerintah Daerah	LN Total Aset
Opini Audit	Skala Peringkat Ordinal Opini Audit

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.892545	(28,55)	0.0000
Cross-section Chi-square	108.760154	28	0.0000

Sumber : Hasil Olahan Output Eviews 9

Pada uji ini, probabilitas *Chi-square* sebesar $0.0000 < \alpha = 0,05$ yang artinya H_0 untuk model ini ditolak dan H_a diterima. Maka estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Uji Housman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.8521573		0.1829

Sumber : Hasil Olahan Output Eviews 9

Diketahui nilai *prob. Cross-section random* sebesar $0,1827 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga estimasi yang baik digunakan dalam model ini adalah *Random Effect Model*.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier

Variabel	Coefficient	Probability
C	5.1590	0.0000
Audit Internal Ukuran Pemerintah Daerah	-0.0014	0.8489
Opini Audit	-0.0048	0.7692
F-statistic	-0.0138	0.0640
Prob (F-statistic)		1.5193
Adj-R ²		0.2156
Obs		0.0178
		87

Sumber : Hasil Olahan Output Eviews 9

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *probability* sebesar 0,2156 lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel audit internal, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *Adjusted R²* sebesar 0.0178 atau 1,78% artinya, variabel independen (audit internal, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit) hanya mampu menjelaskan variabel dependen (*audit report lag*) sebesar 1,78%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil Uji Hipotesis (Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t))

Pengaruh Audit Internal terhadap *Audit Report Lag*

Diketahui bahwa pengujian audit internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag*, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.8489 lebih besar dari 0,05, dengan demikian hipotesis yang menyatakan audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag* ditolak.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Report Lag*

Diketahui bahwa pengujian ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag*, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.7692 lebih besar dari 0,05, dengan demikian hipotesis yang menyatakan pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag* ditolak.

Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Report Lag*

Diketahui pengujian opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag*, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.0640 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag* ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Audit Internal terhadap *Audit Report Lag*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan yang berarti tidak selaras dengan hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti, Hal ini menjelaskan bahwa *audit report lag* tidak dapat diukur menggunakan level kapabilitas APIP. Walaupun APIP telah mendapatkan level kapabilitas yang cukup, hal tersebut tidak menjamin bahwa *audit report lag* akan berkurang. Adapun permasalahannya seperti beban kerja yang relatif berat dan masalah masalah yang berdampak terhadap kinerja APIP yang mempengaruhi kualitas pengawasan dan mengganggu kerjasama tim pengawas dalam melakukan pengawasan serta dapat memperlambat pekerjaan dalam tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Report Lag*

Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag* pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa *audit report lag* tidak dapat diukur menggunakan total aset. Ukuran pemerintah daerah yang besar tidak menjadikan pemerintah daerah dalam menurunkan *audit report lag*. Banyaknya aset yang dimiliki jika tidak diimbangi dengan kemampuan yang baik dalam pencatatan dan lemahnya pengawasan yang menjadi kendala dalam melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu.

Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Report Lag*

Opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag* pada pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Hal yang dapat menyebabkan opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* disebabkan karena auditor telah bekerja secara profesional sehingga apapun opini yang dikeluarkan auditor tidak

mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit. Hal ini menjelaskan bahwa penyelesaian audit secara cepat atau lambat tidak bergantung pada opini yang telah dikeluarkan oleh auditor, sehingga tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap *audit report lag*.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan analisa yang ada dan hasil pengujian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Audit internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan. Hal ini menjelaskan bahwa *audit report lag* tidak dapat diukur menggunakan level kapabilitas APIP. Walaupun APIP telah mendapatkan level kapabilitas yang cukup, hal tersebut tidak menjamin bahwa *audit report lag* akan berkurang. Semakin baik level kapabilitas yang didapat, tidak memacu pemerintah daerah dalam menyelesaikan audit lebih cepat.
2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag* pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa *audit report lag* tidak dapat diukur menggunakan total aset. Ukuran pemerintah daerah yang besar tidak menjadikan pemerintah daerah dalam menurunkan *audit report lag*.
3. Opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag* pada pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa opini audit tidak dapat digunakan untuk mengukur *audit report lag*. Artinya, penyelesaian audit secara cepat atau lambat tidak bergantung pada opini yang telah dikeluarkan oleh auditor.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang diperoleh tidak lengkap dan terbatasnya akses untuk memperoleh data mengenai APIP seperti skor level kapabilitas APIP, karena belum seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah yang di *assessment* APIPnya oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini hanyalah 1,78%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.
3. Terbatasnya objek penelitian yaitu pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah, sehingga belum dapat tergeneralisasi dengan baik.

Implikasi

Implikasi Bagi Akademisi

Bagi akademisi, hasil penelitian ini menunjukkan hanya terdapat 1,78% faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag* dan sisanya belum dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Implikasi Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah

Dari hasil penelitian ini, menyatakan bahwa audit internal yang diprosikan dengan kapabilitas APIP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *audit report lag*, artinya level kapabilitas tidak memacu pemerintah daerah dalam menurunkan *audit report lag*, sehingga sebagai pembina APIP sebaiknya lebih memperhatikan mengenai peningkatan terhadap level kapabilitas APIP dan dapat dilakukan dengan cara memberikan pendampingan secara *intens* dalam melakukan pengawasan.

Implikasi Bagi Auditor Internal

Bagi auditor internal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *audit report lag* artinya opini audit tidak memacu pemerintah daerah dalam menurunkan *audit report lag*. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki laporan keuangan dalam dari segi kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Alifian Nur dan Anisyukurlillah, Indah. 2014. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay. *Accounting Analysis Journal* 3 (3).
- Aziz, A. A., F. Isa., dan M. F. Abu. 2014. Audit Report Lags of Federal Statutory Bodies in Malaysia. *International Conference on Economic, Management and Development*.
- Carlsaw, C.A.P.N., dan Kaplan, S.E. 1991. An Examination of Audit Delay : *Further Evidence from New Zeland. Accounting and Business Research*, 22 (85): 21-32.
- Fontanella, A. dan H. Rossieta. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda di Indonesia. *Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok*.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi Sumber : *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Volume 2, Nomor 1, Hal. : 53-64.
- Hapsari, A.N., Putri, N.K., & Arofah, T. 2016. The Influence of Profitability, Solvency, and Auditor's Opinion to Audit Report Lag at Coal Mining Companies. *Binus Business Review*, 7(2), 197-201. <http://dx.doi.org/10.21512/bbr.v7i2.1685>
- Hardini, Ziza Gita & Sukirman. 2016. Analisis Determinan Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Volume 5 (1).
- Imam, Shahed. 2001. Association of Audit Delay and Audit Firms International Links: Evidence from Bangladesh. *Managerial Auditing Journal*, Volume 16 (3).
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Maret 2011*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Itsniawan, A.A., dan Sri Suranta. 2015. Audit Report Lag pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia: *SNEMA*. ISBN: 978-602-17129-5-5
- Kartika, A. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol 3 (2): 152-171.
- Mohamad, Marziana, Wan Mohammad Taufik, Mohmad Sakarnor Deris. 2012. Audit Delay in Local Authorities: An Exploratory Study in Kedah, Perak and Kelantan. *International Conference on Economics, Business Innovation*, 38:175-179.
- Payne, Jeff L. dan Kevan L. Jensen. 2002. An Examination of Municipal Audit Delay. *Journal of Accounting and Public Policy*, 21: 1-29.
- Puspitasari, Ketut Dian dan Latrini, Made Yeni. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Leverage dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 8 Nomor 2.
- Rachmawati, Sistya. 2008. "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 10, No 1, Hal 1-10.
- Rachmawi, Shella, dkk. 2016. Fator-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerinth Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9 (1):143-160.
- Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Retrieved from http://www.ksap.org/pp/71/PP_71_TAHUN_2010.pdf

- Siregar, Baldric. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, Volume 11 Nomor 2.
- Suharyanto, A., dan Sutaryo. 2016. Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*.
- Sumartini, N.K.A., N.L.S.Widhiyani. 2014. Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran Kap Dan Laba Rugi Pada Audit Report Lag. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 9 (1): 392-409
- Wan Hussin, Wan Nordin dan Hasan Mohammed Bamahros. 2013. The Internal Audit Function Affect Audit Delay. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, Vol. 9 (1):19-32.
- Wicaksono, A.K., Sutaryo. 2017. Faktor Penentu Audit Report Lag Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 7 (2): 209-228.